



Implementation of Supervision on the E-RDKK Program at the Garut Regency Agriculture Office

M Akram Muzakki L^{1*}, Andre Ariesmansyah²
Universitas Pasundan

Corresponding Author: M Akram Muzakki L akrammlazuardi@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Supervision, e-RDKK, Subsidized Fertilizers, Digital Governance, Garut Agriculture Office

Received : 23, October

Revised : 25, November

Accepted: 27, December

©2025 Muzakki, Ariesmansyah:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRACT

Departing from the need to increase accuracy and accountability in data collection and distribution of subsidized fertilizers, this study examines the implementation of supervision of the e-RDKK Program at the Garut Regency Agriculture Office. The literature review is based on Handoko's supervision theory which includes four main stages: standard-setting, implementation measurement, comparison of results with standards, and corrective actions. The research method uses a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and document reviews, with data analysis techniques oriented to categorization of field findings. The results of the study show that the implementation of supervision has gone quite well, especially through extension assistance, digital validation, and a mechanism for locking fertilizer allocation data. However, obstacles such as data mismatches, limited digital infrastructure, and delays in data updates are still major obstacles. Corrective actions are generally carried out reactively through reverification and updating of data directly in the system.

Pelaksanaan Pengawasan pada Program E-RDKK di Dinas Pertanian Kabupaten Garut

M Akram Muzakki L^{1*}, Andre Ariesmansyah²

Universitas Pasundan

Corresponding Author: M Akram Muzakki L akrammlazuardi@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Pengawasan, e-RDKK, Pupuk Bersubsidi, Digital Governance, Dinas Pertanian Garut

Received : 23, October

Revised : 25, November

Accepted: 27, December

©2025 Muzakki, Ariesmansyah:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRAK

Berangkat dari kebutuhan peningkatan akurasi dan akuntabilitas dalam pendataan serta penyaluran pupuk bersubsidi, penelitian ini mengkaji pelaksanaan pengawasan Program e-RDKK di Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Kajian pustaka berlandaskan teori pengawasan Handoko yang mencakup empat tahap utama: penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan hasil dengan standar, dan tindakan korektif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, dengan teknik analisis data yang berorientasi pada kategorisasi temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan cukup baik, terutama melalui pendampingan penyuluh, validasi digital, serta mekanisme penguncian data alokasi pupuk. Namun, kendala seperti ketidaksesuaian data, keterbatasan infrastruktur digital, serta keterlambatan pembaruan data masih menjadi hambatan utama. Tindakan korektif umumnya dilakukan secara reaktif melalui verifikasi ulang dan pembaruan data langsung di sistem.

PENDAHULUAN

Kabupaten Garut dikenal sebagai salah satu daerah agraris di Jawa Barat dengan potensi pertanian yang besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, lebih dari 50% penduduk Garut menggantungkan hidup pada sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan hortikultura (BPS Garut, 2023). Namun, ketergantungan tinggi terhadap pupuk bersubsidi menjadikan distribusi pupuk sebagai isu yang sangat sensitif. Setiap keterlambatan atau ketidaktepatan distribusi berimplikasi langsung pada produktivitas petani kecil. Pemerintah merespons permasalahan tersebut dengan memperkenalkan sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) yang memanfaatkan basis data kelompok tani secara digital agar distribusi pupuk bisa lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran. Sejak tahun 2018, e-RDKK diujicobakan, namun implementasinya terus diperkuat melalui berbagai regulasi.

Puncaknya, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi secara tegas menekankan pentingnya tata kelola digital dalam penyaluran pupuk bersubsidi, dengan prinsip tujuh tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan penerima). Perpres ini juga mengamanatkan pembangunan sistem informasi pupuk bersubsidi terintegrasi, yang mencakup perencanaan, pengawasan, evaluasi, hingga penagihan dan pembayaran. 1 Regulasi tersebut diperkuat oleh Permentan Nomor 4 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa setiap petani penerima pupuk bersubsidi harus terdaftar dalam e-RDKK dan disahkan oleh kepala dinas pertanian kabupaten/kota. Hal ini berarti, hanya petani yang terdigitalisasi dalam sistem yang berhak menerima pupuk subsidi. Sementara itu, Permentan Nomor 15 Tahun 2025 memberikan detail teknis pelaksanaan Perpres, mulai dari mekanisme penyaluran oleh BUMN pupuk, keterlibatan pengecer, penggunaan KTP dan kartu perbankan sebagai sarana transaksi, hingga kewajiban pelaporan digital. Lebih jauh, Petunjuk Teknis (Juknis) Tahun 2025 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mengatur pedoman penyaluran pupuk dari kios pengecer ke petani, termasuk opsi surat kuasa penebusan melalui aplikasi i-Pubers.

Meski aturan sudah semakin komprehensif, dalam praktiknya implementasi e-RDKK masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan, proses verifikasi data yang memerlukan pendampingan penyuluh pertanian, serta tingkat literasi digital yang bervariasi di kalangan petani. Hal ini menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam mengenai bagaimana dalam program e-RDKK dijalankan di tingkat daerah. Penelitian sebelumnya telah mengkaji kebijakan pupuk bersubsidi dan evaluasi program e-RDKK di beberapa daerah seperti Malang dan Medan (Ferdiansyah, 2025; Ridho Izharsyah, 2022). Namun, studi yang secara khusus mengangkat aspek pengawasan pada pelaksanaan digital governance e-RDKK di Kabupaten Garut masih sangat terbatas. Gap penelitian ini cukup signifikan mengingat karakter wilayah dan kelompok tani yang menyebar hingga pelosok desa, yang dapat memberikan gambaran unik tentang tantangan dan peluang digitalisasi pertanian. Dengan latar belakang tersebut,

penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengawasan dalam program e-RDKK di Dinas Pertanian Kabupaten Garut.. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur tentang pelaksanaan pengawasan di sektor publik, khususnya pada layanan pertanian. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Dinas Pertanian Kabupaten Garut dan Kementerian Pertanian dalam merumuskan strategi digitalisasi layanan yang lebih inklusif, efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Buku Manajemen (edisi revisi 2015, Yogyakarta: BPFE), T. Hani Handoko menjelaskan bahwa pengawasan (controlling) adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Indikator Pengawasan (Menurut Handoko, 2015): 1. Penetapan standar (standards setting) Menentukan ukuran kinerja yang diinginkan, baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. 2. Pengukuran pelaksanaan (performance) Mengukur hasil nyata dari pelaksanaan kerja. 3. Perbandingan hasil dengan standar measurement) (comparison) Mengevaluasi apakah terdapat deviasi atau penyimpangan dari standar. 4. Tindakan koreksi (corrective Mengambil langkah perbaikan untuk memastikan tujuan tercapai. action) Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori pengawasan dari Handoko (2015) karena teori tersebut memiliki kerangka yang sistematis dan aplikatif dalam konteks birokrasi publik. Handoko menekankan empat tahap utama dalam proses pengawasan, yaitu: penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, perbandingan hasil dengan standar, dan tindakan koreksi. Model ini sangat relevan dengan mekanisme pengawasan program e-RDKK yang juga menuntut adanya tolok ukur administratif, evaluasi berbasis data digital, serta tindakan korektif melalui validasi dan verifikasi lapangan. Selain itu, teori Handoko memberikan keseimbangan antara aspek administratif dan adaptif, sehingga sesuai dengan karakteristik pengawasan dalam era pemerintahan digital yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi berbasis data. Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan konseptual yang paling tepat untuk menganalisis efektivitas pengawasan pelaksanaan program e RDKK di Kabupaten Garut. Penjelasan teori disini

METODOLOGI

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bisa memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pengawasan program e-RDKK di Kabupaten Garut, berdasarkan pengalaman langsung dari para pelaksana kebijakan dan penerima manfaat di lapangan. Pemilihan informan dalam penelitian ini, yaitu memilih informan dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang relevan dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Informan yang terlibat termasuk Sub Koordinator Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Garut sebagai informan utama, Koordinator BPP Tarogong Kaler sebagai informan penting, serta petani sebagai informan tambahan yang mewakili penerima program.

Data dikumpulkan melalui wawancara yang mendalam, observasi langsung, dan pengumpulan dokumen. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi tentang bagaimana pengawasan dilakukan, proses pengecekan data e RDKK, serta tantangan yang dihadapi oleh para pelaksana dan petani. Observasi dilaksanakan saat kegiatan pendataan, pengecekan identitas petani, serta pendampingan dari penyuluh untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang cara pelaksanaan program di lapangan. Selain itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tambahan seperti dokumen e RDKK, arsip penyuluh, dan catatan administrasi yang dapat mendukung informasi wawancara dan observasi. Kombinasi dari ketiga teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih dapat dipercaya, menyeluruh, dan sesuai dengan tujuan dari penelitian.

Analisis data dalam studi ini dilaksanakan dengan mengikuti model yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi proses pengurangan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap pengurangan data, peneliti mengelompokkan, memusatkan perhatian, dan menyederhanakan data asli melalui proses pengkodean dan kategorisasi, sehingga hanya informasi yang relevan dengan fokus penelitian yang tersisa. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel agar lebih mudah dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan yang muncul di lapangan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara bertahap selama proses penelitian dan diuji kebenarannya melalui triangulasi sumber serta teknik untuk memastikan bahwa temuan yang didapat valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk memastikan kevalidan data, studi ini menggunakan empat kriteria penilaian yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba yang dikutip kembali oleh Creswell & Creswell (2018:256), yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, sementara transferabilitas diperkuat dengan memberikan deskripsi konteks penelitian yang sangat rinci. Dependabilitas dijamin dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis, dan konfirmabilitas dicapai dengan menyediakan bukti lapangan seperti kutipan dari informan dan catatan observasi, sehingga temuan penelitian benar benar didasarkan pada data dan bukan pada pandangan pribadi peneliti.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengawasan pada program e-RDKK di Dinas Pertanian Kabupaten Garut disajikan melalui analisis transkrip wawancara, memo penelitian, dan kategorisasi data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan melibatkan empat dimensi utama berdasarkan teori pengawasan Handoko, yaitu penetapan standar, pengukuran pelaksanaan pekerjaan, perbandingan hasil dengan standar, serta tindakan perbaikan.



Gambar 1. Kategori Koding Atlas TI Penetapan Standar

Kategori pertama yaitu Penetapan Standar yang terdiri dari lima belas kode yaitu, Standar Kebutuhan, Validasi Data, Verifikasi Lahan, Keanggotaan Petani, Data Petani, Syarat Administratif, Ketentuan KEMENTAN, Prosedur Pengajuan, Luas Lahan, Arahan PPL, Validasi NIK, Sistem Distribusi, Dokumen Pendukung, dan Regulasi pertanian.

Dalam kategori Penetapan Standar, terlihat bahwa dasar pengaturan kebutuhan pupuk bagi petani terbentuk dari sistem yang dirancang oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian (KEMENTAN).

Proses penetapan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari regulasi dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan secara nasional. Kedua elemen ini berperan sebagai penyebab munculnya standar baku dalam penyaluran pupuk, baik dari sisi jumlah maupun tata cara pengajuan. Regulasi menjadi fondasi utama, sementara ketentuan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan yang lebih operasional. Dari sinilah terbentuk acuan utama berupa standar dosis pupuk, yang disesuaikan dengan jenis tanaman dan luas lahan yang dimiliki petani.

Proses penetapan standar ini berjalan melalui mekanisme administratif yang cukup ketat. Setiap petani diwajibkan melengkapi data, termasuk dokumen berupa KTP, KK, serta NIK yang valid. Elemen-elemen tersebut menjadi bagian dari syarat administratif yang memastikan penerima bantuan benar-benar terverifikasi. Dalam konteks ini, validasi dan verifikasi memiliki hubungan yang saling terkait, validasi berfungsi memastikan kesesuaian identitas dan data lahan dengan database nasional, sedangkan verifikasi menjadi tahap pemeriksaan akhir sebelum data dimasukkan ke sistem distribusi pupuk. Dengan demikian,

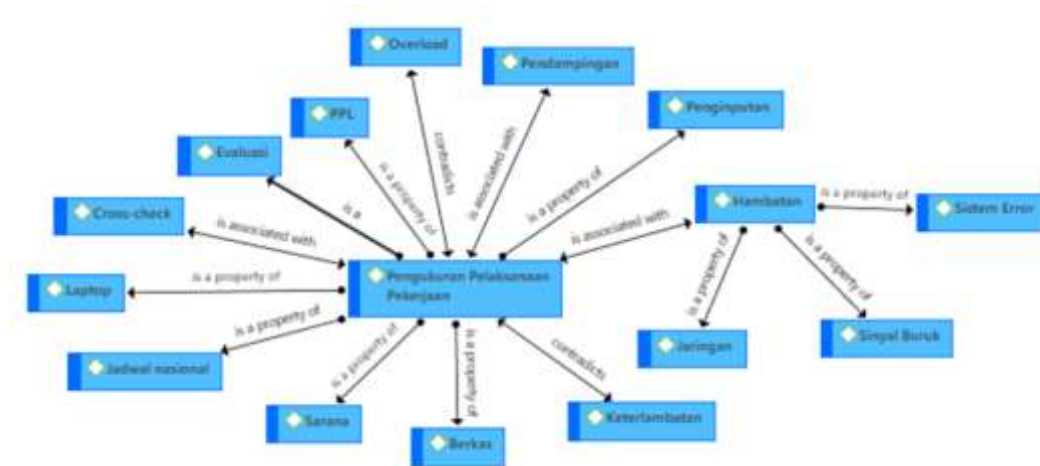
aspek administrasi ini bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi penopang utama dalam menjaga ketepatan sasaran program.

Selain aspek administratif, keanggotaan kelompok tani juga menjadi salah satu syarat penting dalam dimensi penetapan standar. Keanggotaan ini mencerminkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi tidak diberikan secara individu, melainkan melalui lembaga kolektif yang terdaftar resmi. Hubungan antara keanggotaan, syarat administratif, dan validasi data menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara struktur kelembagaan dan sistem pengawasan. Hal ini memperlihatkan bahwa standar bukan hanya berbicara tentang aturan tertulis, tetapi juga menuntut keteraturan sosial di tingkat petani.

Dari sisi teknis, lahan dan dosis menjadi dua elemen yang saling berhubungan erat. Luas lahan menentukan besarnya kebutuhan pupuk yang akan ditetapkan oleh *KEMENTAN*, sedangkan dosis mencerminkan implementasi konkret dari standar tersebut di lapangan. Dalam pelaksanaannya, petani tidak sepenuhnya menentukan sendiri dosis pupuk, melainkan mengikuti arahan penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang berperan memastikan penerapan standar sesuai kondisi aktual di wilayah masing-masing. Hubungan antara arahan, dosis, dan prosedur pengajuan memperlihatkan adanya mekanisme pengendalian dari hulu ke hilir mulai dari penetapan regulasi hingga pelaksanaan teknis di lapangan.

Keseluruhan sistem ini berjalan di bawah kerangka regulasi yang menjadi penyebab terbentuknya seluruh mekanisme tersebut. Regulasi tidak hanya melahirkan standar teknis, tetapi juga membentuk pola hubungan antarunsur administrasi dan teknis di lapangan. Sementara itu, prosedur menjadi penghubung yang memastikan setiap tahapan, mulai dari pengisian data hingga verifikasi dan pengajuan pupuk berjalan sesuai ketentuan. Dokumen dan data menjadi properti dari sistem tersebut, sedangkan validasi dan verifikasi menjadi bentuk asosiasi yang menjaga konsistensi penerapan standar di berbagai tingkat.

Dengan demikian, dimensi Penetapan Standar memperlihatkan jaringan hubungan yang saling berkaitan antara aspek regulatif, administratif, dan teknis. Regulasi dan ketentuan menjadi penyebab utama lahirnya standar; data, dokumen, dan keanggotaan menjadi properti administratifnya; sedangkan lahan, dosis, dan arahan menjadi unsur pelaksanaannya di lapangan. Seluruh relasi ini menunjukkan bahwa penetapan standar tidak hanya merupakan prosedur birokratis, tetapi juga sistem pengendalian mutu yang memastikan distribusi pupuk tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan riil petani.



Gambar 2. Kategori Koding Atlas TI Pengukuran Pelaksanaan Perkerjaan

Kategori kedua yaitu Pengukuran Pelaksanaan Pekerjaan yang terdiri dari lima belas kode yaitu, Evaluasi, Cross-check, Peningkatan, Jadwal Nasional, Sistem Error, Sinyal Buruk, Overload, Sarana, Laptop, Jaringan, Pendampingan, PPL, Berkas, Keterlambatan, Hambatan. Dalam kategori Pengukuran Pelaksanaan Pekerjaan, terlihat bahwa proses pelaksanaan tugas oleh PPL dan tim e-RDKK merupakan hasil dari kombinasi antara kinerja optimal, keterbatasan sarana, serta kendala teknis sistem yang dihadapi di lapangan. Dimensi ini mencerminkan bagaimana kualitas pelaksanaan kerja diukur melalui efektivitas, ketepatan waktu, serta kemampuan adaptasi terhadap hambatan operasional.

Pada tahap awal, PPL dan tim e-RDKK menjadi elemen utama yang berperan sebagai pelaksana lapangan. Mereka bertanggung jawab terhadap akurasi data dan peningkatan sistem. Kinerja yang optimal ini merupakan *property of* pelaksanaan pekerjaan, sebab tanpa peran mereka, proses administrasi pupuk bersubsidi tidak akan berjalan sesuai target nasional. Namun, kinerja ini sering kali terhambat oleh error server dan sinyal buruk, terutama menjelang penutupan periode peningkatan nasional. Dalam konteks hubungan, error server dan sinyal buruk dapat dikategorikan sebagai *is cause of* keterlambatan input data, karena keduanya menjadi penyebab langsung menurunnya efisiensi kerja.

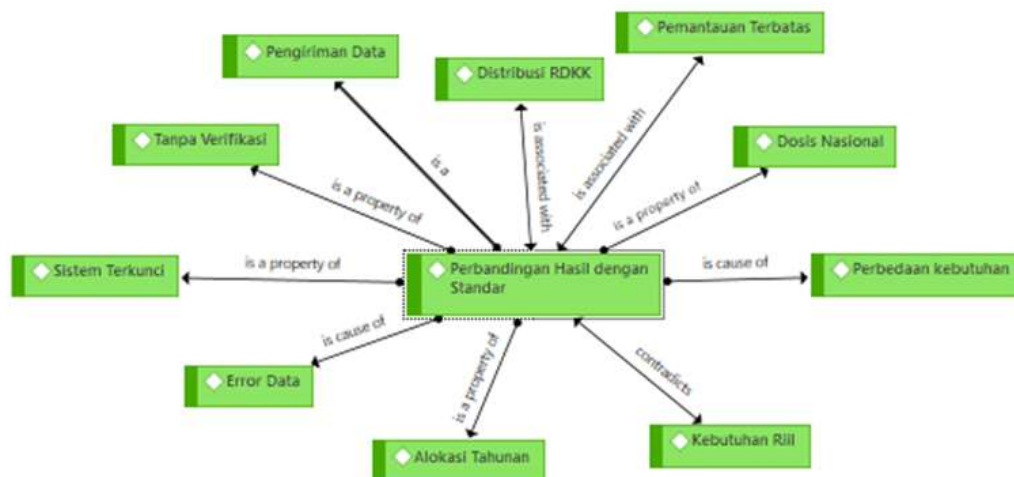
Sementara itu, overload nasional dan batas waktu input memperkuat tekanan administratif dalam proses pengukuran kerja. Keduanya *is associated with* beban kerja tinggi yang dialami petugas lapangan. Peningkatan data yang dibatasi oleh waktu dan jadwal nasional menjadi indikator penting dari sistem pengukuran kinerja yang kaku dan terpusat. Hubungan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada desain sistem nasional yang mengatur tempo dan volume kerja.

Dari sisi fasilitas, kekurangan sarana seperti laptop dan jaringan lambat menjadi *is cause of* keterlambatan dan ketidakefisienan. Hambatan ini memperlihatkan bahwa produktivitas PPL bukan semata hasil kemampuan manusia, melainkan dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur yang tersedia. Dalam hal ini, sarana kerja merupakan *property of* pelaksanaan pekerjaan, karena menjadi bagian inheren dari proses pengukuran kinerja.

Selanjutnya, terdapat mekanisme evaluasi dua kali setahun, yang berfungsi sebagai alat ukur formal terhadap hasil pelaksanaan kerja. Evaluasi ini *is a* bagian dari sistem pengawasan internal Dinas Pertanian, di mana data yang tidak menebus pupuk akan di-cross-check untuk memastikan akurasi laporan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya menilai hasil, tetapi juga menjadi instrumen pembenahan terhadap pelaksanaan pekerjaan sebelumnya.

Kegiatan pengisian data petani di bawah pendampingan PPL memperlihatkan hubungan *is associated with* aspek partisipatif dan ketelitian kerja. Pendampingan ini menjadi tolok ukur kualitas pelaksanaan karena menunjukkan kedekatan antara petugas dan petani dalam memastikan kevalidan data. Namun, hambatan sinyal dan keterlambatan penyerahan berkas *contradicts* target penyelesaian pekerjaan tepat waktu, menggambarkan ketegangan antara ideal sistem dan realitas lapangan.

Secara keseluruhan, hubungan antar kata kunci dalam dimensi Pengukuran Pelaksanaan Pekerjaan membentuk jejaring sebab-akibat yang kompleks. Kinerja PPL dan tim e-RDKK menjadi inti utama, yang dipengaruhi oleh kendala teknis (error server, sinyal buruk, overload), batasan administratif (jadwal nasional, periode input), serta keterbatasan fasilitas (laptop, jaringan). Semua elemen ini berujung pada kebutuhan evaluasi berkala sebagai bentuk pengendalian mutu kerja. Dengan demikian, pengukuran pelaksanaan pekerjaan bukan hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memperlihatkan dinamika adaptasi manusia dan sistem dalam mencapai target pelayanan publik yang akurat dan tepat waktu.



Gambar 3. Kategori Koding Atlas TI Perbandingan Hasil/Pelaksanaan dengan Standar

Kategori ketiga yaitu Perbandingan Pelaksanaan/Hasil dengan Standar yang terdiri dari sepuluh kode yaitu, Pengiriman Data, Tanpa Verifikasi, Sistem Terkunci, Error Data, Alokasi Tahunan, Kebutuhan Riil, Perbedaan Kebutuhan, Dosis Nasional, Pemantauan Terbatas, Distribusi e-RDKK.

Dalam kategori Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar, terlihat bahwa proses pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan program pertanian sangat bergantung pada kinerja penyuluh pertanian lapangan (PPL) serta efektivitas sistem e-RDKK yang digunakan untuk mendata kebutuhan pupuk. Di lapangan, pelaksanaan ini menunjukkan dinamika yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh faktor teknis, waktu, serta sarana pendukung yang terbatas. PPL dan tim e-RDKK bekerja optimal untuk memastikan data petani dapat terinput sesuai jadwal nasional, namun kenyataannya sering kali dihadapkan pada kendala teknis seperti gangguan server, sinyal yang lemah, dan beban sistem yang tinggi menjelang penutupan input. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hambatan teknis dan waktu merupakan elemen yang saling berkaitan dan menjadi tantangan utama dalam pengukuran pelaksanaan pekerjaan.

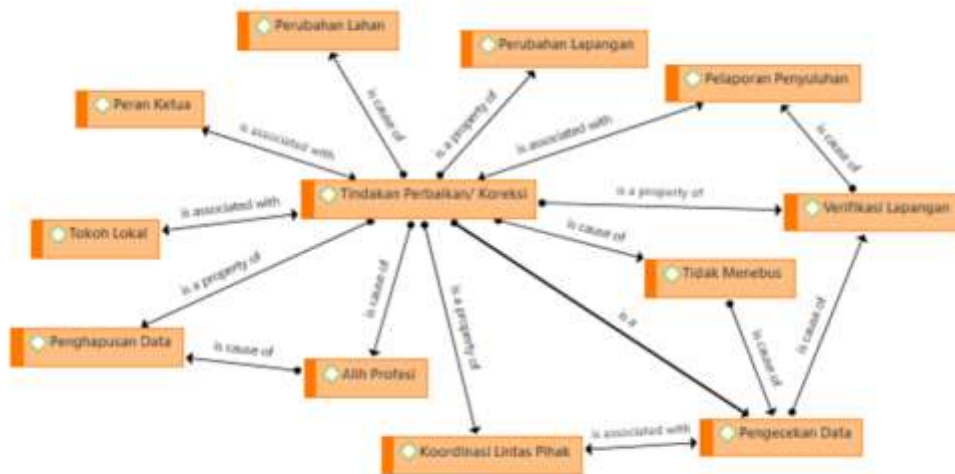
Di sisi lain, terdapat pula aspek administratif yang mengikat pelaksanaan kegiatan ini. Proses penginputan data mengikuti jadwal nasional dengan waktu dan periode tertentu, yang secara tidak langsung membatasi fleksibilitas petugas lapangan. Hal ini memperlihatkan bahwa mekanisme pengukuran pelaksanaan tidak bersifat bebas, melainkan diatur dengan sistem waktu yang ketat agar sinkron dengan kebijakan pusat. Namun, keterbatasan sarana seperti laptop, jaringan, dan perangkat kerja lainnya menjadi faktor pembatas yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan di lapangan. Keterbatasan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara standar operasional sistem dengan kondisi faktual di lapangan yang dijalankan oleh para pelaksana program.

Lebih jauh, pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya berhenti pada tahap input data, tetapi juga mencakup evaluasi berkala yang dilakukan dua kali setahun. Evaluasi ini berfungsi sebagai alat ukur kinerja, khususnya melalui cross-check data bagi petani yang tidak menebus pupuk bersubsidi. Proses evaluasi ini dapat dipandang sebagai bagian penting dari sistem pengawasan, karena melalui mekanisme tersebut, ketidaksesuaian data dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Dalam konteks ini, evaluasi dan cross-check data berfungsi sebagai properti dari sistem pengukuran yang menunjukkan adanya upaya menjaga akurasi serta akuntabilitas pelaksanaan program.

Di lapangan, partisipasi petani juga menjadi elemen yang penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Petani mengisi data di bawah pendampingan PPL di balai penyuluhan, yang memperlihatkan adanya kolaborasi langsung antara aparatur pelaksana dan penerima manfaat. Pendampingan ini memastikan bahwa petani memahami prosedur pengisian data dan mengikuti aturan yang berlaku. Namun, hambatan seperti keterlambatan penyerahan berkas dan sinyal yang buruk sering kali menyebabkan proses ini tidak berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Hubungan antara keterlambatan berkas dan sinyal buruk menunjukkan pola sebab-akibat yang memperlambat pelaksanaan pekerjaan dan menurunkan efisiensi sistem secara keseluruhan.

Dengan demikian, kategori Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar memperlihatkan keterkaitan erat antara beberapa faktor: kinerja PPL sebagai pelaksana lapangan, keterbatasan sarana pendukung, sistem yang dibatasi oleh waktu, serta evaluasi sebagai alat pengawasan dan penilaian hasil. Hambatan teknis seperti error server, sinyal lemah, dan overload sistem tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari rantai sebab-akibat yang memengaruhi kualitas pelaksanaan program. Sementara itu, pendampingan petani dan evaluasi dua kali setahun menjadi bentuk konkret dari upaya menjaga kualitas data dan efektivitas pelaksanaan.

Secara keseluruhan, dimensi ini menunjukkan bahwa perbandingan pelaksanaan dengan standar bukan hanya persoalan teknis penginputan data, melainkan juga menyangkut sinkronisasi antara sistem nasional dan realitas lapangan. Relasi antar elemen di dalamnya memperlihatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada kolaborasi PPL, kesiapan infrastruktur, serta kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lokal



Gambar 4. Kategori Koding Atlas TI Tindakan Perbaikan/Koreksi

Kategori keempat yaitu Kategori Tindakan Perbaikan/ Koreksi yang terdiri dari sepuluh kode yaitu, Pengecekan Data, Peran Ketua, Tokoh Lokal, Penghapusan Data, Alih Profesi, Koordinasi Lintas Pihak, Tidak Menebus, Verifikasi Lapangan, Pelaporan Penyuluhan, Perubahan Lapangan, dan Perubahan Lahan.

Dalam kategori Tindakan Perbaikan/Koreksi, terlihat bahwa proses pengawasan dan penyesuaian data dalam pendistribusian pupuk bersubsidi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga melibatkan koordinasi sosial dan teknis di lapangan. Mekanisme ini terbentuk dari kombinasi tindakan pengecekan data, verifikasi lapangan, serta koordinasi lintas pihak yang melibatkan penyuluh, dinas, dan kelompok tani. Ketiga elemen tersebut menjadi inti dari sistem koreksi yang menjaga ketepatan data dan memastikan subsidi pupuk benar-benar diterima oleh petani aktif.

Pada tahap awal, pengecekan data menjadi langkah dasar dalam mengidentifikasi kelompok tani atau individu petani yang tidak menebus pupuk. Dari sini, penyuluh lapangan bersama ketua kelompok tani dan tokoh lokal mulai melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan penyebab ketidaksesuaian.

Dalam praktiknya, pengecekan ini tidak sekadar administratif, tetapi bersifat aktif karena membutuhkan penelusuran terhadap kondisi petani di lapangan, termasuk perubahan status aktivitas, lahan garapan, hingga alih profesi. Dengan demikian, pengecekan dan verifikasi dapat dipandang sebagai *properti* utama dari tindakan korektif yang dilakukan oleh dinas.

Selain langkah teknis, kategori ini juga memperlihatkan peran penting ketua kelompok tani dan tokoh lokal sebagai jembatan sosial antara petani dan pemerintah. Mereka berfungsi membantu penyuluh dalam memastikan informasi yang disampaikan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Keterlibatan mereka dapat dikategorikan sebagai bagian dari *koordinasi lintas pihak*, yang menunjukkan bahwa sistem perbaikan data tidak hanya mengandalkan struktur birokrasi formal, tetapi juga memanfaatkan relasi sosial di tingkat lokal. Peran ini memperkuat efektivitas tindak koreksi karena komunikasi berjalan dua arah antara petani dan dinas.

Proses koordinasi lintas pihak menjadi jantung dari sistem koreksi ini. Setiap temuan kesalahan data selalu ditindak melalui rapat koordinasi antara penyuluh, dinas, dan ketua kelompok tani. Dari hasil koordinasi inilah muncul keputusan administratif seperti penghapusan data bagi petani yang tidak aktif, telah meninggal, atau beralih profesi. Penghapusan ini bukan semata tindakan teknis, tetapi bagian dari mekanisme penertiban data agar alokasi pupuk bersubsidi tepat sasaran. Dalam hal ini, koordinasi dapat dikatakan *menyebabkan* atau *is cause of* lahirnya keputusan korektif seperti verifikasi dan penghapusan data.

Di sisi lain, pelaporan penyuluh menjadi tahap akhir dari rangkaian tindakan perbaikan. Setiap hasil pengecekan, verifikasi, dan koordinasi dituangkan dalam laporan resmi kepada dinas. Laporan ini berfungsi sebagai bukti administratif sekaligus dokumentasi untuk perbaikan sistem ke depan. Dengan demikian, pelaporan dapat dipahami sebagai *hasil* atau *konsekuensi langsung* dari seluruh proses koreksi yang telah dilakukan sebelumnya.

Elemen lain seperti alih profesi, perubahan lahan, dan tidak menebus pupuk menjadi *pemicu* munculnya tindakan korektif. Ketiga hal tersebut sering kali menjadi tanda adanya ketidaksesuaian antara data sistem dan kondisi riil petani. Dalam konteks ini, hubungan antar elemen menunjukkan pola sebab-akibat yang berlapis: ketidaksesuaian, pengecekan, verifikasi, pelaporan, penghapusan. Pola ini memperlihatkan bahwa setiap tindakan korektif tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dalam satu rantai pengawasan data.

Secara keseluruhan, kategori Tindakan Perbaikan/Koreksi menunjukkan bahwa keberlanjutan distribusi pupuk bersubsidi bergantung pada kemampuan lembaga dan aktor lokal dalam menjaga validitas data. Proses pengecekan, verifikasi, koordinasi, dan pelaporan saling terhubung membentuk sistem pengawasan yang responsif. Sementara itu, peran sosial ketua kelompok dan tokoh lokal memastikan tindakan korektif tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki legitimasi sosial di mata petani. Dengan demikian, Tindakan Perbaikan/Koreksi bukan sekadar prosedur pembaruan data, melainkan refleksi dari kolaborasi fungsional antara pemerintah, penyuluh, dan petani dalam menjaga akurasi dan akuntabilitas program pertanian.

PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan e-RDKK di Kabupaten Garut memiliki dinamika yang kompleks sebagai bagian dari implementasi tata kelola digital di sektor pertanian. Teori pengawasan Handoko (2015) memberikan kerangka analitis yang relevan dalam memahami proses tersebut.

Pada tahap penetapan standar, sistem e-RDKK mengoperasikan mekanisme top-down yang memastikan ketertiban administratif, namun fleksibilitas lokal menjadi terbatas. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa standar terpusat seringkali tidak sepenuhnya menyesuaikan kondisi agronomis wilayah.

Pada tahap pengukuran pelaksanaan pekerjaan, efisiensi pelaksanaan sangat bergantung pada kapasitas infrastruktur digital dan kesiapan sumber daya manusia. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketergantungan tinggi terhadap stabilitas jaringan dan server nasional. Infrastruktur digital yang belum merata menghambat proses validasi, sehingga berdampak pada ketepatan waktu penginputan. Kondisi ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang menekankan perlunya kesiapan teknologi dan literasi digital dalam implementasi kebijakan berbasis sistem elektronik.

Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar menunjukkan adanya gap antara data sistem dan kondisi faktual lapangan. Ketidaksesuaian data muncul akibat perubahan lahan, rendahnya pembaruan data petani, serta keterbatasan verifikasi pihak penyuluh. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan optimal dalam memastikan keterbaruan data. Penemuan ini menguatkan pandangan bahwa efektivitas pengawasan digital tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh aktivitas kontrol sosial dan administratif di tingkat lokal.

Pada tahap tindakan perbaikan, mekanisme koreksi dilakukan melalui verifikasi lapangan dan koordinasi dengan penyuluh serta kelompok tani. Namun, tindakan koreksi bersifat reaktif dan kerap dilakukan setelah muncul masalah ketidaksesuaian data. Hal ini menunjukkan perlu adanya sistem peringatan dini serta peningkatan kapasitas penyuluh. Keterlibatan ketua kelompok tani dan tokoh lokal juga tampak menjadi penguat dalam proses komunikasi dan kontrol sosial, sehingga dapat menjadi model pengawasan partisipatif yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa pengawasan e-RDKK telah memberikan dampak positif terhadap ketertiban penyaluran pupuk bersubsidi, tetapi masih menyimpan tantangan struktural dalam hal infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, serta mekanisme verifikasi data.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan program e-RDKK di Kabupaten Garut telah dilaksanakan berdasarkan empat tahapan pengawasan menurut Handoko. Program ini membantu meningkatkan akurasi data dan transparansi penyaluran pupuk bersubsidi. Namun, pengawasan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala teknis, keterbatasan sarana pendukung, serta belum meratanya kemampuan digital petani dan penyuluh. Selain itu, mekanisme verifikasi dan tindakan koreksi masih bersifat reaktif dan sangat bergantung pada aktivitas lapangan.

1. Penguatan Infrastruktur Digital
Dinas Pertanian perlu meningkatkan akses jaringan dan ketersediaan perangkat digital bagi PPL dan tim e-RDKK untuk mempercepat proses input data.
2. Peningkatan Literasi Digital Petani
Program pelatihan berkala bagi petani dan kelompok tani diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya validitas data dalam e-RDKK.
3. Sistem Deteksi Dini Kesalahan Data
Pengembangan fitur peringatan otomatis dalam sistem e-RDKK diperlukan untuk mendeteksi ketidaksesuaian data sebelum periode tanam dimulai.
4. Penguatan Peran PPL dan Kolaborasi Lokal
Menambah jumlah penyuluh atau mengoptimalkan peran perangkat desa serta ketua kelompok tani sebagai bagian dari pengawasan partisipatif.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup wilayah dan jumlah informan, sehingga temuan bersifat kontekstual pada Kabupaten Garut. Penelitian selanjutnya dapat memperluas konteks dengan membandingkan pelaksanaan pengawasan e-RDKK di beberapa daerah untuk memperoleh gambaran implementasi yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi efektivitas integrasi sistem e-RDKK dengan aplikasi digital lainnya, serta pengaruh literasi digital petani terhadap akurasi data dan ketepatan penyaluran pupuk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Garut, para penyuluh pertanian lapangan, ketua kelompok tani, serta seluruh informan yang telah memberikan waktu dan informasi berharga dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak akademik dan rekan-rekan yang telah memberikan masukan, arahan, dan dukungan hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. (2023). Kabupaten Garut dalam angka 2023. BPS Garut. <https://garutkab.bps.go.id>.
- Bungin, B. (2010). Penelitian Kualitatif. Kencana.
- Ferdiansyah, M. (2025). Implementasi pengawasan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Malang terhadap pengawasan pupuk bersubsidi (Studi Kabupaten Malang) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- Handoko, T. H. (2015). Manajemen (Edisi kedua). BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, M. S. P. (2010). Manajemen: Dasar, pengertian, dan masalah. Bumi Aksara.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.
- Nirwana, & Izharsyah, J. R. (2022). Strategi pengawasan internal penyaluran pupuk subsidi dalam rangka transparansi program E-RDKK di Kelurahan Tangkahan Medan Labuhan. Jurnal KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik, 1(1), 12–20.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 6 Tahun 2025. (2025). Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022. (2025). Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. (2025). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2007). Management (10th ed.). Pearson Prentice Hall.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2014). Organizational behavior (15th ed.). Pearson Education Limited.

Siswanto, H. B. (2005). Pengantar manajemen. Bumi Aksara.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.